Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 39562-39568

Persepsi Mahasiswa PTN Surabaya Terhadap Performa Kinerja DPR Periode 2024-2029

Elvina Damayanti[1], Muhammad Turhan Yani[2]
Universitas Negeri Surabaya
Email: elvina.22036@mhs.unesa.ac.id [1], muhammadturhan@unesa.ac.id [2]

Published: July , 2026

ABSTRAK

Persepsi publik terhadap performa kinerja lembaga negara adalah indikator penting untuk menilai seberapa baik demokrasi, tata kelola negara dan legitimasi politik. Mahasiswa memiliki kemampuan juga pengetahuan tentang sistem kenegaraan yang kuat, akses yang luas ke informasi melalui media digital dan kemampuan untuk menyampaikan opini publik, baik secara *offline* maupun *online* sebagai kelompok demografi yang relatif muda, terdidik, dan sering berpartisipasi dalam ruang publik. Dewan perwakilan rakyat memiliki peran kunci dalam membetuk opini-opini publik, termasuk persepsi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja DPR secara keseluruan melalui indikator transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas dan integritas. Metode analisis kuantitatif deskripsi dengan mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan di UNESA, UNAIR, dan UPV "Veteran" JATIM sebagai populasi dalam penelitian sebanyak 399 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan google formulir. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai persepsi mahasiswa terhadap performan kinerja DPR cenderung pada kategori kurang memuaskan dengan 220 responden 55%. Respon kurang memuaskan yang dirasakan responden disetiap indikator menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami fungsi dan peran DPR sebagai lembaga legislatif, tetapi juga mampu menilai sejauh mana pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan harapan publik. Anggota DPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, respondivitas dan integritas.

Kata Kunci: Persepsi mahasiswa, kinerja DPR, transparansi, akuntabilitas, afektivitas, responsivitas, dan integritas.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Menurut Gibson 1995 dalam (Hertanto, 2023) persepsi adalah bagaimana orang berpikir dan memahami dunia. Persepsi publik terhadap performa lembaga negara adalah indikator penting untuk menilai seberapa baik demokrasi, tata kelola negara, dan legitimasi politik. Ada kemungkinan bahwa seseorang memiliki persepsi yang berbeda dari objek yang sama, karena adanya perbedaan dalam sistem nilai dan ciri kepribadian individu tersebut (Irsyad Syahputra et al., 2024). Persepsi publik terhadap pejabat legislatif selalu menjadi masalah strategis di Indonesia. Mahasiswa aktif juga terdapat mahasiswa aktivis yang dikenal sebagai kelompok dengan kesadaran politik yang tinggi dibandingkan mahasiswa umum (Gustam et al., 2024). Mereka sering menjadi aktor utama dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik dan perilaku elit politik, termasuk kinerja DPR. Persepsi mahasiswa terhadap lembaga legislatif dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan politik dan kualitas komunikasi publik yang dibangun antar wakil rakyat dan generasi muda.

DPR tidak hanya merancang undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintah, tetapi juga mewakili kepentingan rakyat (Sugiman, 2020). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, citra DPR kerap menjadi sorotan karena kasus-kasus korupsi, rendahnya tingkat kehadiran sidang, dan adanya kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil survei nasional yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sering lebih rendah dibandingkan

dengan lembaga negara lainnya. Hasil survei Litbang Kompas (Tatang Guritno & Bagus Santosa, 2023) menunjukkan bahwa mayoritas orang menganggap DPR "hanya kadang-kadang" memperhatikan aspirasi Masyarakat, bahkan 24 persen mengatakan aspirasi mereka tidak terserap sama sekali, dan hanya 10,8 persen menganggap DPR sudah aspiratif. Meskipun survei terbaru yang dilakukan pada Juni 2024 menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap DPR menjadi 62,6 persen, masyarakat masih mengharapkan DPR untuk memberi manfaat nyata dan memperkuat fungsinya sebagai penyerap aspirasi (DPR RI, 2024).

Gaya berbicara yang terkesan meremehkan atau tidak empatik terhadap masyarakat telah memunculkan persepsi negatif di kalangan mahasiswa. (Armani & Inayatullah, 2024) menunjukkan bahwa generasi muda, termasuk mahasiswa, menilai banyak politisi tidak memenuhi ekspektasi mereka, khususnya dalam aspek etika komunikasi publik. Isu yang menjadi sorotan mahasiswa yang ramai dibicarakan di media sosial dan berbagai forum publik yaitu terkait anggota DPR yang diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Nafa Urbach salah satu anggota dewan yang dilaporkan karena dianggap hedon dan tamak melalui pernyataan yang mengatakan "kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI". Hal tersebut membuat publik marah dikarenakan pemerintah sedang menyuarakan efesiensi anggaran, namun tunjangan dan gaji DPR dinaikkan. Selain itu, ada Ahmad Sahroni yang juga menjadi sorotan publik akibat ucapannya Ketika menjawab pertanyaan soal desakan pembubaran DPR. Sahroni mengatakan "Mental manusia yang begitu adalah mental orang tolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarkan DPR adalah orang yang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar? Enggak bodoh semua kita" merupakan diksi yang tidak pantas diucapkan oleh anggota DPR (Danu Damarjati, 2025).

Hal ini sejalan dengan temuan (Arrifqi et al., 2023) yang menggunakan analisis big data dalam mengkaji persepsi publik terhadap DPR terkait pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). DPR kerap dinilai oleh masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, seolah "tutup telinga" terhadap berbagai kritik dan aspirasi publik. Alih-alih merespon secara terbuka dan transparan, lembaga legislatif sering kali dianggap memilih untuk mengabaikan suara rakyat atau hanya menanggapinya secara formalitas tanpa tindak lanjut nyata. Konteks ini menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa di Surabaya mengenai kinerja DPR untuk periode 2024–2029 pada tahun pertama bukan hanya merupakan cermin dari kinerja resmi, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral politik, tingkat integritas, dan akuntabilitas individu anggota legislatif. Oleh karena itu, penelitia ini bertujuan untuk menggambarkan pandangan mahasiswa di Surabaya tentang kinerja DPR secara keseluruhan, termasuk dalam hal legislasi, transparansi publik, dan etika politik setelah munculnya berbagai kasus pelanggaran etik yang berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Persepsi mahasiswa sebagai generasi muda dan penggerak perubahan sangat penting saat kepercayaan publik menurun karena kasus korupsi, komunikasi politik yang terkesan angkuh, dan kurangnya transparansi. Mahasiswa PTN Surabaya mencerminkan tingkat kesadaran politik dan kedewasaan demokrasi, dan mereka juga memiliki peran strategis dalam mengkritisi jalannya lembaga negara. Akibatnya, penelitian ini sangat penting untuk mendukung penguatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk membangun warga negara yang kritis, demokratis, dan berkarakter Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga memberi masukan kepada DPR dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan akuntabilitas publik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang mana permasalahan yang akan diteliti ialah kejadian yang sudah berlalu atau sedang berlangsung, didalam konteks ini adalah performa kinerja DPR. Metode penelitian survei merupakan pendekatan kuantitatif yang berkaitan dengan keyakinan, pandangan, sifat, perilaku, hubungan antar variabel, serta untuk menguji berbagai hipotesis mengenai variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari kelompok populasi tertentu (Sugiono, 2019). Metode analisis data kuantitatif deskriptif merupakan metode yang membantu menggambarkan, menunjukkan atau meringkas data dengan cara yang konstruktif yang mengacu pada gambaran statistik yang membantu memahami detail

data dengan meringkas dan menemukan pola dari sampel data tertentu (Sudirman dkk., 2023). Teknik analisis dipilih untuk mengetahui persepsi mahasiswa PTN surabaya terhadap performa kinerja DPR awal periode 2024-2029.

Evaluasi kinerja lembaga negara merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk mengukur tingkat pencapaian suatu lembaga dalam menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Ainullah & Muddin, 2025). Dalam penelitian ini, transparansi didefinisikan sebagai tingkat keterbukaan DPR dalam menyediakan, menyampaikan, dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama awal periode 2024–2029. Akuntabilitas diartikan sebagai tingkat pertanggungjawaban DPR kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga negara. Efektivitas didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan DPR dalam mencapai tujuan serta menjalankan fungsi konstitusionalnya, yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Responsivitas merupakan kemampuan DPR dalam mengenali, merespons, dan menindaklanjuti aspirasi, kebutuhan, serta berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, integritas diartikan sebagai tingkat kejujuran, konsistensi, dan komitmen DPR dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan prinsip etika, moral, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama awal periode 2024–2029.

Teknik yang digunakan untuk pengambilan data penelitian ini adalah dengan menggunakan angket kuesioner. Kuesioner adalah Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dilakukan melalui penyampaian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk mereka jawab (Sugiono, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan kota Surabaya sebagai Lokasi penelitian didasarkan pada posisinya sebagai salah satu pusat Pendidikan tinggi di Indonesia yang memiliki jumlah mahasiswa yang besar dan beragam dari latar belakang sosial, akademik, serta organisasi kemahasiswaan. Kondisi tersebut menjadikan Surabaya sebagai lokasi yang representatif untuk menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap performa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal periode 2024-2029.

Populasi didefinisikan sebagai area generalisasi yang meliputi: obyek atau subyek yang memiliki ciri dan karakteristik spesifik yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan selanjutnya dibuat kesimpulan (Sugiono, 2019). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang sedang menempuh Pendidikan di UNESA, UNAIR dan UPN "Veteran" Jawa Timur. Dengan jumlah seluruh mahasiswa aktif 139.277 mahasiswa. Berdasarkan Laporan Tahunan Universitas Airlangga 2024 (Annual Report, 2025), jumlah mahasiswa aktif 43.143. Berdasarkan sumber resmi situs utama Universitas Negeri Surabaya per pekan 21 Januari 2026, jumlah mahasiswa aktif sebanyak 72.027 (*Unesa*, 2026). Menurut informasi resmi yang ditampilkan di situs utama UPN "Veteran" Jawa Timur sebanyak 24.107 (*UPN* , 2026). Dalam penelitian kuantitatif, sampel merupakan bagian dari keseluruhan serta ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2019). Berdasarkan masalah yang diteliti, untuk penarikan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling karena populasi dalam penelitian ini diketahui maka dalam pengambilan jumlah sampel penelitian menggunakan rumus Slovin (Machali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Surabaya terhadap performan kinerja DPR pada awal periode 2024-2029, dengan menggunakan lima indikator, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Efektifitas, Responsivitas dan Integritas. Kelimanya dianalisis melalui tabulasi data kuesioner dari 399 responden mahasiswa Surabaya. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Publik, evaluasi kebijakan sebagai proses sistematis untuk menilai nilai, manfaat, dan dampak kebijakan publik berdasarkan indikator tersebut. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan dirasakan oleh publik sebagai sasaran kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa PTN Surabaya memiliki persepsi kurang memuaskan terhadap kinerja DPR periode 2024–2029. Dari 399 responden, sebanyak 220 responden (55%) memberikan penilaian kurang memuaskan, sedangkan 176 responden (45%) menilai cukup memuaskan, dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 60,2 yang berada pada kategori kurang memuaskan. Temuan ini menunjukkan bahwa DPR dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan mahasiswa dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, terutama pada aspek efektivitas, responsivitas, dan integritas.

Dalam perspektif Teori Evaluasi Kebijakan Publik William N. Dunn, persepsi tersebut merupakan hasil evaluasi masyarakat berdasarkan lima kriteria, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan integritas (William N. Dunn, 2018). Dominasi penilaian kurang memuaskan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan mahasiswa dan realitas kinerja DPR. Dengan demikian, persepsi mahasiswa dapat dipahami sebagai bentuk evaluasi rasional yang didasarkan pada informasi, pengalaman, dan pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, serta representasi DPR.

Tabel Rekapitulasi dari kelima indikator penelitian

Kategori	Transparansi	Akuntabilitas	Efektivitas	Responsivitas	Integritas
Negatif	194 (49%)	198 (49,62%)	213 (53,38%)	219 (55%)	229 (57%)
Positif	205 (51%)	201 (50,38%)	186 (46,6%)	180 (45%)	170 (43%)

Pada indikator transparansi, hasil penelitian menunjukkan kecenderungan persepsi cukup memuaskan, meskipun selisihnya sangat tipis. Sebanyak 205 responden (51%) memberikan penilaian positif, sedangkan 194 responden (49%) memberikan penilaian negatif. Menurut Dunn, transparansi merupakan prasyarat penting dalam evaluasi kinerja publik karena memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan mengawasi proses pengambilan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai DPR telah cukup terbuka dalam menyampaikan informasi, namun tingkat keterbukaan tersebut belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan publik. Hasil ini berbeda dengan penelitian (Syafiqa Nadhira Kusuma et al., 2025) yang menyatakan DPR memiliki kondisi yang rendah pada bagian transparansi di seluruh tahapan legislasi, dilihat dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja mulai dari perencanaan hingga pengesahan.

Pada indikator akuntabilitas, hasil penelitian juga menunjukkan kecenderungan persepsi cukup memuaskan dengan selisih yang sangat kecil. Sebanyak 201 responden (50,38%) memberikan penilaian positif, sedangkan 198 responden (49,62%) memberikan penilaian negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban DPR belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki tingkat literasi politik tinggi. Dalam perspektif William N. Dunn, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga kemampuan lembaga mempertanggungjawabkan kebijakan secara terbuka, menerima kritik, dan menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat. Tipisnya selisih antara persepsi positif dan negatif menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pertanggungjawaban formal DPR dengan ekspektasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaporan kinerja, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan perluasan partisipasi masyarakat agar akuntabilitas DPR dapat semakin dipercaya oleh publik.

Pada indikator efektivitas, persepsi mahasiswa PTN Surabaya terhadap kinerja DPR awal periode 2024–2029 cenderung kurang memuaskan. Sebanyak 213 responden (53,38%) memberikan penilaian kurang memuaskan, sedangkan 186 responden (46,6%) menilai cukup memuaskan. Menurut William N. Dunn, efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu lembaga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dominasi persepsi negatif mengindikasikan bahwa mahasiswa menilai DPR belum optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta belum mampu

menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Meskipun sebagian mahasiswa menilai DPR telah berupaya menjalankan tugasnya, proporsi tersebut belum cukup besar untuk membentuk persepsi yang positif secara keseluruhan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja DPR masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada indikator responsivitas, hasil penelitian juga menunjukkan kecenderungan kurang memuaskan. Sebanyak 219 responden (55%) memberikan penilaian negatif, sedangkan 180 responden (45%) memberikan penilaian positif. Dalam perspektif William N. Dunn, responsivitas merupakan kemampuan lembaga publik untuk mengenali, merespon, dan menindaklanjuti aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Dominasi persepsi kurang memuaskan menunjukkan bahwa mahasiswa menilai DPR belum optimal dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi publik, serta belum cukup cepat merespons berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Walaupun sebagian responden mengakui adanya upaya DPR dalam menjalankan fungsi representasinya, mayoritas mahasiswa masih menilai respon yang diberikan belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, DPR perlu meningkatkan mekanisme penyerapan aspirasi, memperkuat komunikasi dengan publik, dan menghasilkan kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pada indikator integritas, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa PTN Surabaya terhadap kinerja DPR awal periode 2024–2029 cenderung kurang memuaskan. Sebanyak 229 responden (57%) memberikan penilaian kurang memuaskan, sedangkan 170 responden (43%) menilai cukup memuaskan. Meskipun banyak responden yang memberikan respon positif, jumlah mereka yang memiliki respon negatif cukup tinggi, menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa mengenai integritas DPR belum sepenuhnya memuaskan. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih meragukan kejujuran, komitmen moral, dan konsistensi DPR dalam menjalankan fungsi serta kewenangannya sesuai dengan etika publik. Dibandingkan indikator lainnya, integritas memperoleh penilaian paling rendah karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik. Persepsi tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai kasus pelanggaran etik, korupsi, dan konflik kepentingan yang melibatkan anggota DPR, sehingga meskipun fungsi kelembagaan dinilai berjalan, aspek integritas belum memenuhi harapan mahasiswa.

Secara keseluruhan, analisis terhadap lima indikator transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan integritas menunjukkan bahwa mahasiswa PTN Surabaya cenderung memberikan penilaian kurang memuaskan terhadap kinerja DPR RI awal periode 2024–2029. Penilaian tersebut mencerminkan keraguan tidak hanya terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tetapi juga terhadap komitmen moral DPR dalam mengutamakan kepentingan masyarakat. Meskipun transparansi dan akuntabilitas memperoleh penilaian yang relatif lebih baik, efektivitas, responsivitas, dan terutama integritas masih dinilai belum memenuhi harapan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan mahasiswa dengan realitas kinerja DPR yang mereka amati. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya meragukan sejauh mana DPR menjalankan fungsi dan prosedurnya, tetapi juga mempertanyakan komitmen moral, etika, serta orientasi kepentingan publik dalam praktik kinerja DPR. Dengan kata lain, meskipun DPR sebagai institusi formal dinilai telah menjalankan tugas dan kewenangannya pada tingkat tertentu, hal tersebut belum cukup untuk membangun kepercayaan mahasiswa. Dominasi penilaian negatif mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan normatif mahasiswa terhadap peran DPR dengan realitas kinerja yang mereka amati. Dengan demikian, sikap kurang memuaskan yang dominan bukan mencerminkan apatisme politik, melainkan menunjukkan tingkat evaluasi yang matang, di mana mahasiswa telah mengintegrasikan informasi, pengalaman, serta persepsi terhadap kinerja DPR dan menyimpulkan bahwa lembaga tersebut masih memerlukan perbaikan yang signifikan agar lebih selaras dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan Teori Evaluasi Kebijakan Publik William N. Dunn yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja publik didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan integritas. Dominasi persepsi kurang memuaskan menunjukkan bahwa DPR dinilai belum memenuhi kelima kriteria tersebut secara optimal. Dalam perspektif Dunn, penilaian ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan, pelaksanaan, dan hasil kebijakan. Oleh karena itu,

persepsi mahasiswa dapat dipahami sebagai hasil evaluasi yang rasional berdasarkan informasi, pengalaman, dan pengamatan terhadap praktik kelembagaan DPR. Temuan ini sekaligus menegaskan perlunya perbaikan yang lebih substansial, baik dalam aspek kinerja maupun penguatan integritas dan etika politik, untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik, khususnya di kalangan mahasiswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai Persepsi Mahasiswa PTN Surabaya terhadap Performa Kinerja DPR RI awal Periode 2024–2029, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa cenderung memberikan penilaian yang kurang memuaskan terhadap kinerja DPR pada dua tahun masa jabatannya. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran lima indikator penelitian, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan integritas. Pada indikator transparansi dan akuntabilitas, responden pada kategori positif memang sedikit lebih tinggi dibandingkan kategori negatif. Sebanyak 205 responden (51%) memberikan penilaian cukup memuaskan terhadap transparansi DPR dan 201 responden (50,38%) memberikan penilaian cukup memuaskan terhadap indikator akuntabilitas. Namun, selisih yang sangat tipis dengan ketidak puasan mahasiswa terhadap kinerja DPR menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban DPR masih belum kuat. Dengan kata lain, mahasiswa mengakui adanya upaya DPR dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi upaya tersebut belum sepenuhnya mampu membangun keyakinan publik secara luas.

Sementara itu, pada indikator efektivitas, responsivitas, dan integritas, mayoritas responden memberikan persepsi kurang memuaskan. Sebanyak 213 responden (53,38%) menilai DPR belum efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada indikator responsivitas, 219 responden (55%) menilai DPR belum cukup tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adapun pada indikator integritas, 229 responden (57%) memberikan penilaian kurang memuaskan, menjadikannya indikator dengan tingkat persepsi kurang memuaskan berada pada kategori tertinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih meragukan kemampuan DPR dalam menghasilkan kinerja yang optimal, merespons tuntutan publik secara cepat dan tepat, serta menjaga konsistensi nilai-nilai etika dan kejujuran dalam pelaksanaan tugasnya.

Jika ditinjau melalui teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPR belum sepenuhnya memenuhi kriteria evaluasi publik yang berkaitan dengan efektivitas dan responsivitas. Selain itu, tingginya persepsi kurang memuaskan pada aspek integritas mengindikasikan adanya persoalan kepercayaan publik yang masih menjadi tantangan bagi DPR. Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat cenderung mengevaluasi kinerja DPR tidak hanya berdasarkan aktivitas kelembagaan yang terlihat, tetapi juga berdasarkan sejauh mana DPR mampu menghasilkan manfaat nyata, merespons kebutuhan masyarakat, dan menjaga kredibilitas institusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi DPR RI pada awal periode 2024–2029 bukan hanya terletak pada aspek kinerja administratif atau prosedural, melainkan pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap hasil kerja dan komitmen kelembagaan DPR. Meskipun DPR dinilai cukup terbuka dan relatif akuntabel, mahasiswa masih mempertanyakan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsinya, kemampuan dalam menyerap aspirasi masyarakat, serta integritas lembaga dalam menjalankan amanah rakyat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa persepsi mahasiswa PTN Surabaya terhadap performa kinerja DPR di dua tahun masa jabatannya cenderung kurang memuaskan. Oleh karena itu, DPR perlu melakukan perbaikan yang lebih substansial, tidak hanya melalui peningkatan transparansi informasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas kinerja, penguatan fungsi representasi masyarakat, serta pembangunan budaya integritas yang mampu mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Berdasarkan hasil penelitian, DPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan integritas melalui keterbukaan informasi, pertanggungjawaban yang jelas, serta penguatan etika dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mahasiswa diharapkan tetap mempertahankan sikap kritis, objektif, dan meningkatkan partisipasi politik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan

pemerintahan. Sementara itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan responden dan menggunakan pendekatan mixed methods agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persepsi mahasiswa terhadap kinerja DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Ainullah, M., & Muddin, S. (2025). *KONSEP PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA*. https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie

Annual Report. (2025, December 10). *Laporan Tahunan Universitas Airlangga 2024*. https://fliphtml5.com/cqinm/phtj/Annual_Report_2024/?utm_source

Armani, & Inayatullah, F. (2024). *Journal of Career and Entrepreneurship, Positive and Negative of Gen Z perception on politicians in Indonesia*.

Arrifqi, F., Ainiyatul Munawaroh, D., & Hasna Nafila Rahman, J. (2023). Analisis Persepsi Masyarakat dengan Metode Big Data terhadap Kinerja DPR dalam Memproses RUU PKS. *Jurnal PolGov*, *4*(2), 265–292. https://doi.org/10.22146/polgov.v4i2.3614

Danu Damarjati. (2025, August 31). *4 Anggota DPR Dinonaktifkan Partainya: Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya* . Kompas.Com.

DPR RI. (2024). *LAPORAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN SIDANG 2023-2024*.

Gustam, Firman, & Saleh, M. (2024). PENGARUH AKTIVITAS LEMBAGA KEMAHASISWAAN TERHADAP PEMBENTUKAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN POLITIK MAHASISWA STAI DDI PAREPARE. *Pendidikan Dan Pengajaran*, *2*(9), 296–312.

Hertanto. (2023). Youth Political Perception Towards the Indonesian 2024 Election. *Croatian International Relations Review*, *29*(93), 315–332. https://doi.org/10.2478/CIRR-2023-0065

Irsyad Syahputra, M., Istiqomah, I., Dwi Nur Shanti, R., Qotrhun Nada, A. M., Faisal Gusti Setiadi, M., Tri Nugraha, J., & Tidar, U. (2024). PERSEPSI MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS TIDAR PADA KINERJA PEMERINTAH. *Journal of Governance and Public Administration*, *2*(1), 259–269.

Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (A. Habib, Ed.). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Sudirman, Kondolayuk, M. L., Sriwahyuningrum, A., Cahaya, I. M. E., Astuti, N. L. S., Setiawan, J., Tandirerung, W. Y., Rahmi, S., Nusantari, D. O., Indrawati, F., Fittriya, N. L., Azizah, N., Kurniawati, N., Wardhana, A., & Hasanah, T. (2023). *Metodologi Penelitian 1*.

Sugiman. (2020). FUNGSI LEGISLASI DPR PASCA AMANDEMEN UUD NKRI 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *10*(2), 173–182.

Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; Kedua). Alfabeta.

Syafiqa Nadhira Kusuma, Janter Panjaitan, Unggul Pamekas, Adhirajasa Shidqi Muhamad, Rafli Akbar Rafsanjani, Fidanzani Zulfadikhan Azhar, & Kuswan Hadji. (2025). Keterbatasan Transparansi DPR Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Legislasi : Analisis Partisipasi Publik Dalam Kasus UU Cipta Kerja. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, *2*(4), 71–81. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i4.2686

Tatang Guritno, & Bagus Santosa. (2023, January 23). *Penilaian Publik terhadap DPR Cenderung Negatif* . Litbang Kompas.

Unesa. (2026, January 21). https://unesa.ac.id/?utm_source

UPN . (2026). https://upnjatim.ac.id/

William N. Dunn. (2018). *Public Policy Analysis* (sixth). https://www.perlego.com/ereader/2193127